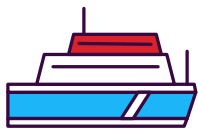
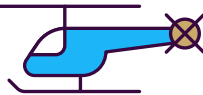


URGENSI PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGAWASAN WILAYAH MARITIM INDONESIA

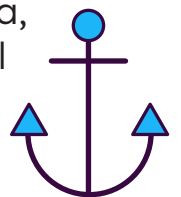
Wilayah perairan Indonesia yang luas kerap disusupi oleh aktivitas ilegal yang datang dari luar (pihak asing), terlebih aparat yang melakukan tugas patroli keamanan memiliki keterbatasan.



Kegiatan ilegal dan pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, dan oleh karena itu, penanganan serius untuk menyikapi hal tersebut perlu dilakukan



Untuk pengelolaan laut, ada dua model yang mengemuka, yaitu model klasik dan model alternatif.



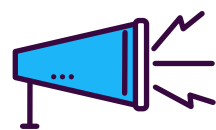
Ketika berbicara soal keamanan maritim Indonesia, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kapasitas *stakeholders* yang terlibat dalam pengamanan maritim dan juga kontur tantangan yang dihadapi Indonesia.

Pendekatan yang digunakan tidak hanya *sea power* (Mahan, 1989), yang lebih tepat dijalankan oleh Angkatan Laut (*Navy*). Namun, juga dapat menggunakan model alternatif pengelolaan laut '*peaceful role*', sehingga fungsi polisionil atau penegakan hukum di laut yang dikedepankan dan hal tersebut menjadi kewenangan *coast-guard* atau badan sipil keamanan laut.

8 ISU Keamanan Maritim

- *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*
- Kejahatan lintas nasional

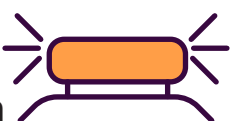
- Pelanggaran wilayah
- Perompakan bersenjata
- Kecelakaan di laut
- Pencemaran laut
- Terorisme di laut
- Invasi kekuatan asing



7 Lembaga

Penegak Hukum (Satuan Tugas Patroli Laut)

TNI-AL, Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115).



IUU Fishing secara faktual menjadi persoalan keamanan maritim yang paling mengemuka, dan pelakunya antara lain berasal dari Vietnam, Malaysia, dan bahkan Indonesia sendiri.

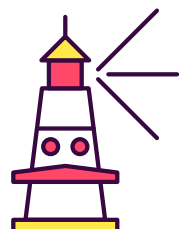
Dinamika di Laut China Selatan (LCS) juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Karena China dipandang terlalu asertif, dan hal itu terlihat antara lain dari kapal China yang terus melakukan operasi di wilayah LCS dan sesekali masuk ke ZEE Indonesia.

Tanggung jawab utama keamanan maritim suatu negara dengan demikian berada pada angkatan laut, penjaga pantai (*coast-guard*), dan berbagai badan maritim yang dimilikinya, dan sudah tentu juga, bergantung pada kemampuan personel, aset, dan infrastruktur pendukung.

Dalam implementasinya, kolaborasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi hal yang penting. Sementara itu, secara eksternal, kerja sama internasional juga perlu dilakukan dan ditingkatkan.

Tim Peneliti:

Drs. Simela Victor Muhamad, MSi.
Dr. Drs. Humphrey Wangke, MSi.
Rizki Roza, S.Ip, M.Si.
Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.
Ziyad Falahi, S. Hub.Int., M.Si.



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI
2021